

## PENGARUH KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA

Oleh : Dinalestari Purbawati

**Abstract :** This study consisted of two test models. The first test model investigated the association between board characteristics such as board size, and proportion of non-executive directors, as well as firm characteristics (e.g. organisational complexity, financial reporting risk, and leverage) on the existence of a risk management committee. The second test model investigated the association between the existence of a risk management committee on the extent of voluntary disclosure.

This study is explanatory research used secondary data. Data was collected from the annual reports non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) the period 2008, 2009 and 2010. Analysis tools used in the first test model is a logistic regression model and a second test using OLS regression.

The results showed that only the variable board size who have a significant positive effect on the existence of the risk management committee and the existence of the risk management committee has a significant positive effect on the extent of voluntary disclosure.

**Keywords :** Board characteristics, Firm characteristics, Risk management committee, Voluntary disclosure, Corporate governance.

### PENDAHULUAN

Semakin banyaknya perusahaan besar yang mengalami masalah kebangkrutan baru-baru ini serta terjadinya krisis keuangan global menjadi faktor pendorong munculnya inisiatif untuk perbaikan *corporate governance* dengan menekankan pada peran manajemen risiko. Pelaksanaan sistem manajemen risiko secara efektif akan sangat mendukung tercapainya *good corporate governance* (Andarini, 2010).

Sistem manajemen risiko yang efektif sendiri merupakan suatu kekuatan perusahaan yang dapat membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Selanjutnya, sistem manajemen risiko yang efektif juga berperan dalam menciptakan nilai bagi para *stakeholder* (COSO, 2004). Karena alasan inilah, aspek pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif. Menjadi peran dewan komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif (Krus dan Orowitz, 2009). Dewan komisaris maupun komite pengawas manajemen memiliki peran penting dalam proses manajemen risiko perusahaan. Keduanya merupakan mekanisme efektif untuk memfokuskan perusahaan pada fungsi pengawasan risiko, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang tepat (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Di Indonesia, perkembangan komite manajemen risiko juga mulai meningkat. Pemerintah mulai memandatkan pembentukan komite manajemen risiko sebagai komite pengawas risiko pada industri perbankan. Namun, berbeda dari industri perbankan dan finansial yang diregulasi secara ketat, pembentukan komite pengawas risiko pada sektor industri lainnya di Indonesia masih bersifat sukarela.

Sebuah sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu perusahaan mencapai tujuan usahanya, meningkatkan pelaporan keuangan dan menjaga reputasi mereka. Salah satu cara meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menjaga reputasi adalah dengan melakukan pengungkapan, khususnya pengungkapan sukarela. Semakin luas pengungkapan sukarela yang dilakukan, maka perusahaan semakin memiliki nilai lebih.

Pengungkapan informasi secara sukarela kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik tertentu perusahaan, salah satunya adalah faktor keberadaan komite pengawas risiko, khususnya komite manajemen risiko. Keberadaan komite ini akan berpengaruh pada perbedaan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Karena terdapat perbedaan luas pengungkapan inilah, sehingga fenomena ini menarik untuk diteliti.

Secara umum, hasil penelitian terdahulu mengenai pembentukan komite (tipe pengawas) masih terdapat *research gap* mengenai hasil penelitian. Penelitian ini berusaha

mempersempit *gap* tersebut melalui hasil penelitian yang akan didapat. Sehingga, akan semakin memperkuat mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan komite.

Sedangkan, penelitian yang menguji pengaruh keberadaan komite manajemen risikoterhadap luas pengungkapan sukarela masih jarang dilakukan. Masih sedikitnya bukti empiris yang menguji mengenai keberadaan komite manajemen risikoterhadap luas pengungkapan sukarela, sehingga fenomena ini menarik untuk diteliti.

Penelitian ini dibuat dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *etal.* (2009) disertai ada penyesuaian dan pengembangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian di Indonesia dan membandingkannya dengan hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini akan menguji hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risikoserta keberadaan komite manajemen risikotersebut terhadap luas pengungkapan sukarela di perusahaan nonfinansial yang *go public* di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, secara umum pertanyaan penelitian ini yaitu, apakah karakteristik dewan dan perusahaan berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risikoserta seberapa jauh pengaruh keberadaan komite manajemen risikoterhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan yang *go public* di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko, serta pengaruh keberadaan komite manajemen risikotersebut terhadap luas pengungkapan sukarela di dalam laporan tahunan perusahaan.

Manfaat dalam penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian sebelumnya, terhadap perkembangan teori yang berhubungan dengan *corporate governance* pada khususnya, dan akuntansi pada umumnya, serta dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk lebih mengetahui arti penting keberadaan komite manajemen risiko demi tercapainya *good corporate governance*.

Penelitian ini menggunakan dua model pengujian yaitu, model pengujian yang pertama menggunakan regresi logistik, kemudian model

pengujian yang kedua menggunakan model regresi OLS. Model pengujian yang pertama bertujuan menguji hubungan antara karakteristik dewan komisaris serta karakteristik perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Selanjutnya, model pengujian yang kedua bertujuan menguji hubungan keberadaan komite manajemen risiko tersebut terhadap luas pengungkapan sukarela.

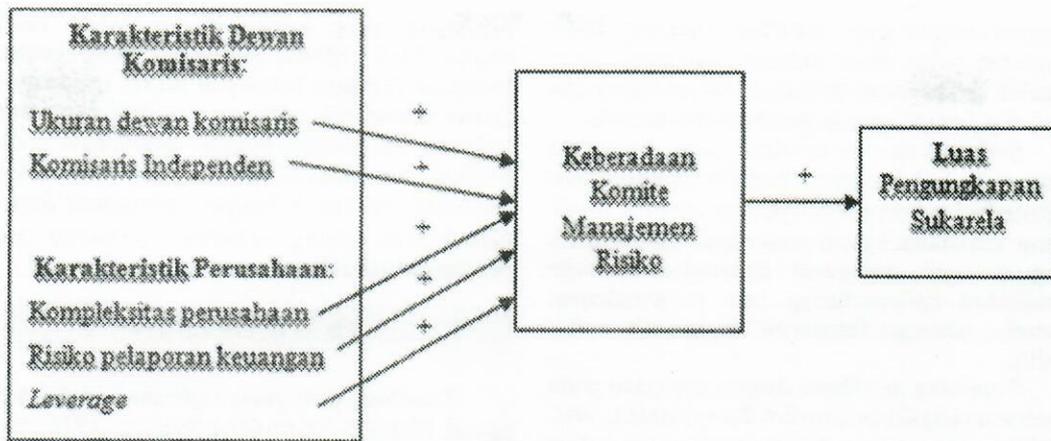
## PEMBAHASAN

Landasan teori yang digunakan adalah teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori agensi sering digunakan sebagai landasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *corporate governance*, khususnya mengenai keberadaan komite. Hal ini dikarenakan pentingnya aspek pengawasan (*monitoring*) demi terwujudnya *good corporate governance*. Kemudian didukung oleh teori *stakeholder* serta teori legitimasi.

Dilihat dari segi pengungkapan sukarela, teori *stakeholder* melandasinya. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Pengungkapan perlu dilakukan karena merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan selama periode tertentu, serta dapat memberikan informasi bagi para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan keuangan.

Teori selanjutnya adalah teori legitimasi. Teorilegitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku masyarakat (Deegan, 2004). Berdasarkan teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989). Hal ini seringkali dapat dicapai melalui pengungkapan dalam laporan perusahaan, khususnya pengungkapan sukarela.

Kerangka teoritis yang terbangun untuk penelitian ini adalah sebagai berikut,



Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini

- H1: Ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan keberadaan sebuah komite manajemen risiko.  
 H2: Proporsi komisaris independen berhubungan positif dengan keberadaan sebuah komite manajemen risiko.  
 H3: Kompleksitas perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan sebuah komite manajemen risiko.  
 H4: Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan keberadaan sebuah komite manajemen risiko.  
 H5: *Leverage* berhubungan positif dengan

keberadaan sebuah komite manajemen risiko.

- H6: Keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan nonfinansial berhubungan positif dengan luas pengungkapan sukarela.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan dua model pengujian yaitu, model pengujian yang pertama menggunakan regresi logistik, yaitu untuk H1, H2, H3, H4, dan H5. Selanjutnya, untuk H6 menggunakan pengujian model regresi OLS, diperoleh hasil sebagai berikut:

#### Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Signifikansi	Hasil
1.	Ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan keberadaan sebuah RMC	0,000	Diterima
2.	Proporsi komisaris independen berhubungan positif dengan keberadaan sebuah RMC	0,409	Tidak Diterima
3.	Kompleksitas perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan sebuah RMC	0,413	Tidak Diterima
4.	Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan keberadaan sebuah RMC	0,115	Tidak Diterima
5.	<i>Leverage</i> berhubungan positif dengan keberadaan sebuah RMC.	0,111	Tidak Diterima
6.	Keberadaan RMC pada perusahaan nonfinansial berhubungan positif dengan luas pengungkapan sukarela.	0,000	Diterima

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini

Sebagian besar perusahaan sampel telah mengungkapkan keberadaan komite manajemen risiko selama periode 2008, 2009, 2010, yaitu sebanyak 245 perusahaan. Berdasarkan hasil regresi logistik, diketahui bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan berhubungan positif dengan keberadaan komite manajemen risiko. Hal ini dikarenakan dalam ukuran dewan yang besar, akan lebih mudah untuk mengalokasikan sumber daya yang besar pula. Selain itu, arus pertukaran keahlian, informasi dan pikiran juga akan terjadi lebih luas. Sehingga, tugas komite manajemen risiko sebagai pengawas risiko dapat berjalan dengan efektif (Subramaniam, *et al.*, 2009). Hasil ini menguatkan penelitian Subramaniam, *et al.* (2009), Chen, *et al.* (2009) dan Carson (2002).

Variabel komisaris independen, kompleksitas perusahaan, pelaporan keuangan perusahaan, dan *leverage* ditemukan tidak berhubungan secara signifikan terhadap keberadaan komite manajemen risiko. Hal ini disebabkan karena kualitas dan pendidikan dewan komisaris dinilai lebih berpengaruh terhadap efektifitas kinerja dewan komisaris dibandingkan dengan tingkat independensinya. Sedangkan, variabel risiko pelaporan keuangan tidak berpengaruh karena kesalahan penilaian persediaan dan piutang umumnya menjadi tanggung jawab komite audit dan auditor internal. Pengukuran variabel risiko pelaporan keuangan juga dinilai kurang tepat. Selanjutnya, perusahaan dengan hutang yang tinggi juga cenderung akan mengurangi aktivitas yang dinilai tidak optimal. Perusahaan lebih berusaha untuk menambah efisiensi usahanya daripada menerapkan praktek *good corporate governance*.

Hasil regresi OLS diketahui bahwa keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan nonfinansial berpengaruh signifikan positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan, keberadaan komite manajemen risiko sebagai komite tipe pengawas merupakan bagian yang penting dari suatu sistem pelaksanaan *good corporate governance*. Dengan adanya komite manajemen risiko, risiko yang dihadapi perusahaan nonfinansial pun dapat lebih diminimalisir. Maka akan berdampak pada pelaporan keuangannya yang lebih berkualitas pula, sehingga perusahaan akan mampu memberikan pengungkapan sukarela yang lebih luas pula.

## PENUTUP

Diikuti dari hasil penelitian ini bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan positif terhadap keberadaan komite

manajemen risiko. Pada perusahaan nonfinansial ukuran dewan komisaris yang besar, akan lebih memudahkan mengalokasikan sumber daya untuk pembentukan komite baru, dalam hal ini komite manajemen risiko. Selain itu, arus pertukaran keahlian, informasi dan pikiran juga akan terjadi lebih luas. Sehingga, tugas komite manajemen risiko sebagai pengawas risiko dapat berjalan dengan efektif.

Kemudian didapatkan hasil pula bahwa keberadaan komite manajemen risiko berpengaruh secara signifikan positif terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan nonfinansial. Keberadaan komite ini pada perusahaan nonfinansial tetap dinilai sebagai komponen yang penting dari suatu sistem pelaksanaan *good corporate governance*, meskipun hal tersebut belum termandatkan. Dengan adanya komite manajemen risiko, risiko yang dihadapi perusahaan nonfinansial pun dapat lebih diminimalisir. Hal ini akan berdampak pada pelaporan keuangan perusahaan yang lebih berkualitas, sehingga perusahaan akan mampu memberikan pengungkapan sukarela yang lebih luas pula. Dengan memberikan pengungkapan sukarela yang lebih luas, akan berdampak pada penilaian positif untuk kredibilitas ataupun nilai perusahaan dimata *stakeholder*. Dengan *stakeholder* memberikan penilaian yang baik, diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai.

Terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan berpengaruh terhadap hasil penelitian ini. Keterbatasan itu adalah komite manajemen risiko merupakan isu yang masih baru, sehingga dalam perkembangannya mengakibatkan masih sedikit perusahaan yang mengungkapkan keberadaan komite manajemen risiko secara jelas. Informasi mengenai komite manajemen risiko hanya diperoleh melalui laporan *corporate governance* dan laporan komite audit dalam *annual report*. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menambahkan penggunaan metode pengumpulan data seperti kuesioner maupun wawancara untuk lebih mengetahui informasi secara lengkap mengenai keberadaan komite manajemen risiko.

Keterbatasan lainnya yaitu, penelitian ini mengeliminasi beberapa variabel penelitian Subramaniam *et al.* (2009) seperti CEO Duality, reputasi auditor, dan jenis industri. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah memperluas penelitian dengan memberikan pengembangan dalam variabel penelitian keberadaan komite manajemen risiko, misalnya dengan menambahkan variabel baru seperti latar belakang pendidikan anggota dewan komisaris.

**DAFTAR PUSTAKA**

---

- Andarini, Putri Wahyu. 2010. "Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan terhadap Pengungkapan *Risk Management Committee* pada Perusahaan *Go Public* Indonesia". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Carson, E. 2002. "Factors Associated with The Development of Board Sub-Committees". *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 10, No. 1, pp. 4-18.
- Chen, Li, A. Kilgore, and R. Radich. 2009. "Audit Committees: Voluntary Formation by ASX Non-Top 500". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 5, pp.475-493.
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. 2004. "Enterprise Risk Management – Integrated Framework". <http://coso.org>.
- Deegan, C. 2004. *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill Book Company. Sydney.
- Guthrie, J., and L.D. Parker. 1989. "Corporate social reporting: a rebuttal of legitimacy theory". *Accounting and Business Research*. Vol. 19 No. 76. pp. 343-52.
- Jensen, Michael C. And William H. Meckling . 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure". <http://google.com>.
- Krus, Cynthia M. and H. L. Orowitz. 2009. "The Risk-Adjusted Board: How Should The Board Manage Risk?". *Corporate Governance Advisor*, Vol. 17, No. 2.
- Subramaniam, Nava, L. Mc. Manus, and Jiani Zhang 2009. "Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 4, pp. 316-339.